

PERSEPSI MAHASISWA TERHADAP POLITIK DINASTI DI INDONESIA

Joko Suryono¹, Purwani Indri Astuti², Nuryani Tri Rahayu³ dan Hariyanto⁴

^{1,3,4} Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo

² Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo

jokowignyo@univetbantara.ac.id

ABSTRAK

Abstrak. Isu tentang kepemimpinan politik selalu menjadi diskusi menarik di kalangan masyarakat. Salah satu isu yang menarik adalah tentang politik dinasti. Fenomena pergantian kepemimpinan yang menetes ke keluarga dekat (politik dinasti) menjadi polemik yang tidak pernah berhenti. Penelitian ini bertujuan untuk memahami Persepsi Mahasiswa Dalam Politik Dinasti di Indonesia. Penelitian ini menggunakan studi deskriptif kualitatif. Penelitian ini berusaha untuk memberikan makna denotatif dan makna konotatif persepsi mahasiswa terhadap politik dinasti. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan teknik wawancara mendalam. Sumber data dalam penelitian ini adalah mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Hasil penelitian ini adalah bahwa di dalam politik dinasti sering muncul hal-hal negatif seperti penyalahgunaan kekuasaan, kemalasan, ketidaktransparan, ketidaktegasan, kualitas kompetensi yang tidak baik, pelanggaran aturan, pengingkaran janji. Politik dinasti berdampak pada hal-hal negatif seperti tindak korupsi, kolusi, nepotisme, penggerogotan demokrasi, rusaknya tatanan di lembaga pemerintahan dan masyarakat. Persepsi negatif mahasiswa terhadap politik dinasti akan berdampak pada ketidakpercayaan mahasiswa kepada pejabat publik melalui pembicaraan politik yang mengarah kepada pengembangan emosi politik yang berupa sindiran-sindiran, kemarahan politik, teriakan politik, penyesalan politik. yang memperkeruh konflik politik

Kata kunci: Persepsi, Politik Dinasti, nilai budaya

PENDAHULUAN

Pergantian pemimpin politik melalui proses demokrasi adalah hal wajar, yang diharapkan akan menghasilkan pemimpin-pemimpin yang memiliki kapabilitas, teguh pendirian yang positif, cerdas, inovatif, adil dan bijaksana. Di negara demokrasi pergantian pemimpin politik selalu melalui pemilihan umum. Pemilihan Umum merupakan salah satu kegiatan demokrasi, yang diselenggarakan oleh penyelenggara sebagai media kedaulatan rakyat dan sarana melibatkan rakyat secara langsung untuk memilih pemimpin politiknya dan digunakan sebagai kesempatan warga masyarakat atau pemilih untuk melakukan penilaian terhadap calon pemimpinnya (Suryono, Astuti, Rahayu, & Widayati, 2019b). Dalam pengambilan keputusan dalam memilih, pemilih menggunakan penilaian dan persepsi yang sudah dimilikinya dalam jangka waktu yang lama terhadap seorang kandidat.

Isu tentang kepemimpinan politik selalu menjadi diskusi menarik di kalangan masyarakat. Salah satu isu yang menarik adalah tentang kepemimpinan dinasti. Fenomena pergantian kepemimpinan yang menetes ke keluarga dekat (politik dinasti) menjadi polemik yang tidak pernah berhenti. Setelah 2 kali periode menjabat, godaan elite politik untuk tetap mempertahankan kekuasaan melalui keluarga tidak bisa terhindari, setelah bapak, dititiskan ke istri, ke anak atau menantu.

Disampaikan oleh (Bathoro, 2011), fenomena dinasti politik muncul dalam politik nasional dan lokal, yang cenderung menjadi jebakan, menimbulkan konflik dan mengganggu konsolidasi demokrasi. Fenomena ini agar tidak mengganggu sistem politik yang sedang dibangun, perlu menguatkan kelas menengah independen agar transisi demokrasi sebagai proses konsolidasi demokrasi dapat berjalan sesuai dengan yang benar, yang selanjutnya dilatih dan didik di parta

politik yang memungkinkan akan memunculkan para pemimpin masa depan yang bisa diandalkan, (Bathoro, 2011).

Kehadiran dinasti politik dalam perebutan kekuasaan dari tingkat daerah ke tingkat nasional tidak terlepas dari peran partai politik dan peraturan pemilihan kepala daerah, kandidat yang dicalonkan oleh partai politik lebih didasarkan pada keinginan elit partai, bukan melalui mekanisme demokrasi dengan mempertimbangkan kemampuan dan integritas calon. Dinasti politik terus membangun jaringan kekuasaannya yang terus berusaha mendominasi dan membunuh demokrasi. Mereka berusaha mempertahankan statusnya dengan mengajukan keluarga untuk menggantikan . Peraturan yang lemah memberikan andil yang besar dengan semakin meluasnya dinasti politik. Praktik politik dinasti juga menciptakan lemahnya fungsi kontrol terhadap tindakan korupsi yang dilakukan oleh pejabat daerah dan kerabat mereka (Susanti, 2018).

Keinginan kuat untuk memilih anggota keluarganya dalam suksesi pemerintahan bertujuan untuk menutupi dosa politiknya. (Djati, 2015a). Dan mempersubur praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) tersebar di hampir semua wilayah di Indonesia (Prianto, 2016).

Selain itu keinginan untuk mewujudkan godaan dalam menciptakan mitos keluarga penguasa, ada hal yang tidak bisa dipungkuri. Keluarga yang berkuasa adalah keluarga yang bisa memberi manfaat kepada masyarakat dalam waktu yang lama. Seperti dikatakan Spence, Weber, Sunarto dalam (Suryono, Astuti, Rahayu, & Widayati, 2019a), mitos selalu mengandung unsur kepercayaan dan karisma, kata mitos menggambarkan sebuah kepercayaan yang dimiliki kelompok masyarakat, mengenai energi kekuasaan yang dimiliki seseorang yang mampu menciptakan perubahan. Mitos muncul karena kepercayaan-kepercayaan, melalui narasi-narasi dalam obrolan, komentar, pemberitaan dan media-media komunikasi.

Mahasiswa adalah kelas menengah independen yang memiliki kemampuan untuk melakukan persepsi kritis dan menilai. Persepsi kritis dan penilaian disini terkait dengan persepsi sosial. Menurut Mulyana (2007) persepsi sosial adalah proses menangkap makna objek-objek sosial dan kejadian-kejadian yang kita alami dalam sebuah lingkungan. Persepsi sosial yaitu proses pencairan informasi untuk pemahaman secara bermakna melalui panca indera (penglihatan, pendengaran, perabaan, pembau, perasa), pengetahuan dan kesadaran (Sarwono, 2010).

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan persepsi konstruktivis. Pendekatan persepsi konstruktivis melihat, bahwa persepsi adalah sebuah pemaknaan kritis terhadap kenyataan dengan melibatkan kesimpulan logis dan emosi. Individu melakukan persepsi terhadap suatu obyek, fenomena melalui tahapan memperoleh pengetahuan dan pengalaman masa lalu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut (Rookes, P., & Willson, 2000).

Pembahasan mengenai persepsi politik remaja banyak dikaji dalam penelitian-penelitian terdahulu diantaranya penelitian mengenai Pengetahuan dan persepsi politik pada remaja oleh Limilia, P., & Ariadne, E tahun 2018. Dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa pemilih pemula memiliki pengetahuan yang rendah tentang konsep, peran, dan fungsi partai politik. Rendahnya tingkat pengetahuan tersebut diiringi dengan persepsi negatif terhadap partai politik. Pemilih pemula mempersepsikan secara negatif parpol sebagai organisasi yang hanya mementingkan diri sendiri, korupsi, dan hanya melakukan pencitraan (Limilia & Ariadne, 2018).

Selain itu terdapat penelitian terdahulu berjudul Bagaimanakah Persepsi Keterpercayaan Masyarakat terhadap Elit Politik? Yang ditulis oleh Haryanto, H. C., & Rahmania tahun 2015. Penelitian tersebut menemukan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap elit politik mengacu pada elite politik yang memiliki motif yang baik yang sesuai dengan norma yang berlaku (Haryanto & Rahmania, 2015).

Penelitian pendahuluan yang terkait dengan persepsi berjudul Penelitian berjudul Pengetahuan dan persepsi politik pada remaja, ini mengkaji tentang tingkat pengetahuan dan persepsi pemilih pemula terhadap partai politik, yang menunjukkan bahwa pemilih pemula memiliki pengetahuan yang rendah tentang konsep, peran, dan fungsi partai politik. Rendahnya tingkat pengetahuan tersebut diiringi dengan persepsi negatif terhadap partai politik. Pemilih pemula

mempersiapkan secara negatif parpol sebagai organisasi yang hanya mementingkan diri sendiri, korupsi, dan hanya melakukan pencitraan (Limilia & Ariadne, 2018).

METODOLOGI PENELITIAN

Judul penelitian ini adalah Persepsi Mahasiswa terhadap Politik Dinasti di Indonesia. Obyek penelitian ini adalah Persepsi Mahasiswa terhadap Politik Dinasti di Indonesia. Penelitian Persepsi Mahasiswa terhadap Politik Dinasti di Indonesia ini menggunakan studi deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif berusaha untuk menggambarkan suatu fenomena atau peristiwa secara mendalam. Penelitian ini berusaha untuk memberikan makna denotatif dan makna konotatif persepsi mahasiswa. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan teknik wawancara mendalam. Sumber data dalam penelitian ini adalah mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini analisa teks yang selanjutnya dilakukan penjelasan, perbandingan, interpretasi dari peneliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penyimpulan, analisis, triangulasi data, interpretasi data Persepsi Mahasiswa terhadap Politik Dinasti di Indonesia dapat digambarkan sebagai berikut :

Jawaban pertanyaan apabila politik dinasti diterapkan di era demokrasi :

Jawaban :

Informan 1: Tidak setuju, karena politik dinasti sama seperti halnya nepotisme

Informan 2: Tidak setuju, karena politik dinasti hanya untuk orang-orang tertentu/ sekelompok orang/ keluarga

Informan 3: Tidak setuju, jika politik dinasti berkembang di era reformasi dan demokrasi dapat memunculkan ketidakadilan, korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Informan 4: Tidak setuju, politik dinasti hanya mementingkan kekerabatan

Informan 5: Tidak setuju, karena jika pemimpin yang diwariskan kepada anak jika anak tidak bisa menjadi pemimpin yang baik maka masyarakat akan rusak.

Informan 6: kurang setuju, karena di era sekarang yang dibutuhkan pemimpin yang kreativitas dan memiliki pola pikir yang maju harus mempertimbangkan suara rakyat tidak semata mata karena jalinan kerabat/ keluarga dapat dengan leluasa menduduki posisi yang strategis.

Informan 7: Tidak setuju, karena politik yang dijalankan turun temurun akan memicu korupsi dan nepotisme.

Informan 8: Tidak setuju, karena jika hanya mengandalkan kekerabatan maka orang yang mendapatkan kekuasaan bukan orang yang benar- benar terpilih

Informan 9: Tidak setuju

Jawaban pertanyaan politik dinasti sudah mengakar di Indonesia

Jawaban :

Informan 1: Menurut saya kondisi politik dinasti di Indonesia sudah cukup parah kondisinya, terjadi di banyak lembaga yang termasuk di lembaga tinggi

Informan 2: Rata-rata sekarang sudah banyak mengakar di perpolitikan di Indonesia, contohnya diperangkat desa. Kades dan orang-orang dibawahnya adalah orang-orang terdekat dan keluarganya walaupun pemilihannya melibatkan masyarakat

Informan 3: Politik dinasti sudah sejak lama mengakar di Indonesia. Semenjak orde baru, politik dinasti sudah terlihat dan terjadi, contohnya di era Presiden Suharto, bahkan sampai era reformasi saat ini masih terjadi beberapa wilayah tertentu

Informan 4: Politik dinasti sudah lama mengakar di Indonesia hingga sekarang, namun di era ini sudah semakin sedikit karena sekarang pemegang kekuasaan memilih yang terbaik dan pengalaman yang banyak sehingga memberikan dampak yang baik

Informan 5: Politik dinasti sudah sejak lama mengakar di Indonesia dan sudah menjadi kebiasaan

Informan 6: : Sejak Indonesia masih berdiri kerajaan-kerajaan yang kebanyakan ahli dalemnya merupakan keluarga sendiri, sampai sekarangpun masih berkembang dari jabatan terendah sampai tertinggi dan mungkin akan terus berkembang lagi sampai keturunan dibawahnya.

Informan 7: Menurut saya sudah menjadi hal umum, karena tidak sedikit politik dinasti ada di Indonesia dan itu menguntungkan untuk keturunan kelompok tertentu.

Informan 8: Politik dinasti sudah sangat mengakar di Indonesia

Informan 9: Menanggapi politik dinasti di Indonesia menurut saya itu sudah menjadi seperti budaya, sehingga politik dinasti itu sendiri banyak dilakukan oleh pejabat politik dari kalangan pejabat elit atas sampai bawah.

Jawaban pertanyaan politik dinasti masuk dalam kategori aktifitas politik yang bernilai budaya dan beradab

Jawaban :

Informan 1: Menurut saya politik dinasti memang merupakan bagian dari budaya, tetapi sebuah budaya yang buruk dan tidak berbudaya dan sebuah kejahatan yang diterapkan dalam alam demokrasi

Informan 2: Tidak berbudaya, karena politik dinasti berlaku curang dengan memilih orang terdekat

Informan 3: Politik dinasti merupakan nilai budaya yang tidak baik

Informan 4: Politik dinasti termasuk nilai budaya yang buruk/ tidak baik

Informan 5: Politik dinasti merupakan nilai budaya yang harus dihindari

Informan 6: Sejak Indonesia masih berdiri kerajaan- kerajaan yang kebanyakan ahli dalemnya merupakan keluarga sendiri, sampai sekarangpun masih berkembang dari jabatan terendah sampai tertinggi dan mungkin akan terus berkembang lagi sampai keturunan dibawahnya

Informan 7: Menurut saya politik dinasti sudah merupakan budaya di Indonesia dan tidak sedikit yang tidak beradab dan bermoral.

Informan 8: Politik dinasti termasuk dalam kegiatan yang beradab dan berbudaya di Indonesia. Karena faktanya hal tersebut terus ada dari generasi ke generasi. Namun politik dinasti tersebut lebih condong ke arah budaya yang kurang baik.

Informan 9: Politik dinasti bisa dikatakan tidak beradab jika penguasa politik itu melakukan atau mencari kekuasaan dengan cara yang tidak fair dan menggunakan money politic, black campaign dalam upaya memperoleh kekuasaan. Politik dinasti merupakan norma budaya yang negatif, karena mengarah ke KKN.

PENERAPAN POLITIK DINASTI DI ERA DEMOKRASI

Hasil jawaban informan terkait dengan pertanyaan penerapan politik dinasti di era demokrasi seluruh informan menjawab tidak setuju . Menurut mereka politik dinasti sama halnya dengan nepotisme , mementingkan kekerabatan, keluarga, orang-orang tertentu, sekelompok orang tertentu. Kepemimpinan dalam politik dinasti adalah kepemimpinan yang diwariskan kepada anak, istri atau keluarga terdekat. Politik dinasti dapat memunculkan ketidakadilan, korupsi, kolusi, dan nepotisme dan masyarakat akan menjadi rusak. Diera sekarang dibutuhkan pemimpin yang kreativitas dan memiliki pola pikir yang maju harus, mempertimbangkan suara rakyat .

Hal tersebut menunjukkan bahwa informan (mahasiswa) memiliki persepsi negatif terhadap politik dinasti. Politik dinasti adalah pengelolaan kekuasaan oleh sekelompok orang diarahkan untuk mempertahankan kekuasaan selamanya, yang mementingkan jalur kekerabatan keluarga yang berdampak dengan munculnya ketidakadilan, korupsi, kolusi, dan nepotisme dan rusaknya masyarakat. Djati (2015) mengatakan politik dinasti dipengaruhi dari sumber politik seperti kesukuan, populisme, dan feodalisme. Kepentingan politik dari pemimpin lokal memilih anggota keluarganya dalam suksesi pemerintahan adalah untuk menutupi dosa politiknya. Selanjutnya mengenai dampak politik dinasti Aninda (2013) mengatakan, bahwa tradisi politik dinasti akan semakin membuka dan memperbesar peluang besar bagi jalan korupsi kolusi dan nepotisme dan lebih jauh mengubah wajah demokrasi. Demokrasi bukan lagi sebagai ruang hidup kontestasi ide, gagasan, program dan ideologi, melainkan pasar transaksi jual-beli kepentingan individu dan

kelompok kekerabatan. Ditambahkan oleh Zuhro (2013) di dalam politik dinasti terdapat realitas adanya pelanggaran etika pemerintahan, penyimpangan APBD, dan management organisasi. Politik dinasti menjadi kanker ganas yang menggoroti demokrasi. Selain itu politik dinasti memiliki beberapa dampak negatif lain seperti membuat birokrasi tidak akomodatif, tidak transparan dan tidak akuntabel.

POLITIK DINASTI SUDAH MENGAJAR DI INDONESIA

Hasil jawaban seluruh informan terkait dengan pertanyaan apakah politik dinasti sudah mengajar di Indonesia adalah politik dinasti di Indonesia sudah banyak mengajar, sudah cukup parah, sudah menjadi hal umum, sudah menjadi seperti budaya. politik dinasti terjadi di banyak lembaga, dari lembaga tinggi sampai lembaga rendah, contohnya diperangkat desa, di pemerintahan daerah, pemerintahan pusat. Politik dinasti ada di Indonesia menguntungkan untuk keturunan kelompok tertentu, dilakukan oleh pejabat politik dari kalangan pejabat elit atas sampai bawah.

Hal tersebut menunjukkan bahwa informan (mahasiswa) memiliki persepsi politik dinasti sudah sangat mengajar, membudaya dan melembaga dari tataran elit politik sampai dengan pejabat paling rendah. Politik dinasti cenderung mengarah kepada kondisi destruktif dan penciptaan potensi konflik peradaban. Apabila tidak dicegah, akan menyebabkan tidak bertahannya sebuah kehidupan manusia (masyarakat). Peradaban adalah alat untuk mempertahankan kehidupan manusia, seperti dikatakan (Purwasito, 2003) kebudayaan dan peradaban (civilization) adalah upaya, usaha, budidaya manusia mendayagunakan cipta, rasa, karsa dalam kehidupannya agar survive (tetap bertahan hidup).

Selain itu pengajaran budaya politik dinasti yang dilakukan oleh pelaku adalah didorong oleh motif penciptaan mitos pada dirinya. Penciptaan mitos pada diri seseorang diperlukan waktu yang panjang. Seperti dikatakan oleh Suryono, et all (2019), proses membangun mitos bukanlah pepesan kosong. Membangun mitos yang dilakukan seseorang, perlu bentuk kerja nyata, energinya yang besar dapat memberi sesuatu kepada masyarakat. Membangun mitos adalah upaya seseorang agar selalu dianggap memberi sesuatu yang bermanfaat dan masyarakat mengingatnya dalam waktu yang lama. Dengan pembatasan masa jabatan yang diatur Undang-Undang langkah yang diambil adalah dengan memunculkan pemitosan keluarga melalui politik dinasti.

POLITIK DINASTI MASUK DALAM KATEGORI AKTIFITAS POLITIK YANG BER NILAI TIDAK BERBUDAYA DAN BERBERADAB

Hasil jawaban informan terkait dengan pertanyaan, apakah politik dinasti masuk dalam kategori aktifitas politik yang bernilai budaya dan beradab, jawaban informan-informan adalah : politik dinasti masuk dalam kategori aktifitas politik yang memiliki nilai budaya yang buruk, tidak berbudaya, tidak beradab, tidak bermoral, norma budaya yang negatif, berlaku curang, mengarah ke KKN dan sebuah bentuk kejahatan di dalam alam demokrasi. Pelaku politik dinasti mencari kekuasaan dengan cara yang tidak fair, menggunakan kekuasaannya, money politic, black campaign.

Hal tersebut menunjukkan bahwa informan (mahasiswa) memiliki persepsi negatif terhadap politik dinasti sebagai sebuah nilai budaya yang tidak baik, tidak beradab, tidak bermoral, bentuk kejahatan di dalam alam demokrasi yang akhirnya akan mengarah kepada tindak korupsi kolusi dan nepotisme. Politik dinasti akan cenderung melanggar norma, moral dan tidak berbudaya. Politik dinasti akan memunculkan hal-hal negatif, seperti dikatakan oleh Diamond (2007), penyalahgunaan kekuasaan, yaitu sebuah upaya bertindak melampaui wewenang yang seharusnya dan tidak sesuai dengan tujuan yang seharusnya. Pelaku politik dinasti cenderung malas (tidak mau bekerja keras), bekerja keras memberikan gambaran bahwa pemerintahan selalu berusaha memenuhi kebutuhan masyarakatnya (Galston & Kamarck, 2008). Cenderung tidak transparan, transparansi terkait dengan pemerintahan yang demokratis selalu melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan (Biezen, 2003). Ketidaktegasan, ketegasan dalam dinamika pemerintahan

maupun politik memberikan gambaran akan kemampuan maupun kompetensi untuk mengambil keputusan dengan baik, dalam politik dinasti biasanya dalam mengambil keputusan ‘terjadi tebang pilih’ (Light, 2008). Tidak memiliki kompetensi yang baik, Neumann, Srbljinovic, & Schatten (2014) menjelaskan kompetensi merupakan salah satu indikator untuk melihat seberapa jauh kemampuan yang dimiliki oleh seorang politikus di dalam menghadapi kondisi yang krisis. Berkasus, suka melanggar aturan, kondisi tersebut menurut Faturachman (2000) mengarah pada bentuk manipulasi maupun pengingkaran dan pelanggaran terhadap aturan. Kebohongan atau Pengingkaran janji, Solomon, Robert (2001) menjelaskan bahwa dalam konteks kepercayaan keberadaan akan kebohongan berkaitan dengan label adanya kecurangan dan dianggap tidak memiliki kepedulian terhadap pihak yang merasa dibohongi.

KESIMPULAN

Berdasarkan sajian data dan pembahasan dalam penelitian tersebut dapat diambil kesimpulan, bahwa :

Di dalam politik dinasti sering muncul hal-hal negatif seperti penyalahgunaan kekuasaan, kemalasan, ketidaktransparan, ketidaktegasan, kualitas kompetensi yang tidak baik, pelanggaran aturan, pengingkaran janji. Politik dinasti berdampak pada hal-hal negatif seperti tindak korupsi, kolusi, nepotisme, penggerogotan demokrasi, rusaknya tatanan di lembaga pemerintahan dan masyarakat. Persepsi negatif mahasiswa terhadap politik dinasti akan berdampak pada ketidakpercayaan mahasiswa kepada pejabat publik yang mengembangkan budaya politik dinasti melalui pembicaraan politik yang mengarah kepada pengembangan emosi politik yang berupa sindiran-sindiran, kemarahan politik, teriakan politik, penyesalan politik. yang memperkeruh konflik politik (Astuti, Arumi, Pratiwi, & Suryono, 2019). Diera sekarang yang dibutuhkan bukan pimpinan dari politik dinasti, melainkan pemimpin yang kreativitas dan memiliki pola pikir yang maju dan mempertimbangkan suara rakyat .

DAFTAR PUSTAKA

- Aninda, R. (2013). Pelanggaran Dinasti Politik ‘Samawi’ Sebuah Studi Perilaku Pemilih Model Psikologis Dalam Pilkada Bantul Tahun 2010, 3(2), 15–28. <https://doi.org/10.14710/politika.3.2.2012.15-28>
- Astuti, P. I., Arumi, S., Pratiwi, V. U., & Suryono, J. (2019). Analisis Implikatur dalam Wacana Meme Politik pada Akun Instagram. *KOMUNIKA: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 13(2), 265–281. <https://doi.org/10.24090/komunika.v13i2.2084>
- Bathoro, A. (2011). Perangkap Dinasti Politik Dalam Konsolidasi Demokrasi. *Jurnal FISIP UM-RAH*, 2(2), 115–125.
- Biezen, I. (2003). Financing political parties and election campaigns - guidelines. Council of Europe. Retrieved from file:///C:/Users/PC/Downloads/CoE_2003_Financing_Political_Parties_and_election_campaigns_-_guidelines.pdf
- Diamond, L. (2007). Building Trust in Government by Improving Governance. 7th Global Forum on Reinventing Government:
- Djati, W. R. (2015a). Revivalisme Kekuatan Familisme dalam Demokrasi: Dinasti Politik di Aras Lokal. *Masyarakat: Jurnal Sosiologi*, 18(2). <https://doi.org/10.7454/mjs.v18i2.3726>
- Djati, W. R. (2015b). Revivalisme Kekuatan Familisme dalam Demokrasi: Dinasti Politik di Aras Lokal. *MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi*, 18(2). <https://doi.org/10.7454/mjs.v18i2.3726>
- Faturachman. (2000). *Dinamika psikologi dan sosial kepercayaan (The dynamics of psychology and social trust)*. Yogyakarta: Yayasan Pengembangan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada.
- Galston, W. A., & Kamarck, E. C. (2008). Change You Can Believe In Needs A Government You Can Trust. Retrieved from http://content.thirdway.org/publications/133/Third_Way_Report_-_Trust_in_Government.pdf
- Haryanto, H. C., & Rahmania, T. (2015). Bagaimanakah Persepsi Keterpercayaan Masyarakat terhadap Elit Politik? *Jurnal Psikologi*, 42(3), 243. <https://doi.org/10.22146/jpsi.9913>

- Light, P. C. (2008). A government ill executed: The depletion of the federal service. *Public Administration Review*. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2008.00878.x>
- Limilia, P., & Ariadne, E. (2018). Pengetahuan dan persepsi politik pada remaja. *Jurnal Psikologi Sosial*, 16(1), 45–55. <https://doi.org/10.7454/jps.2018.5>
- Mulyana, D. (2007). *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*. Edisi Revisi.
- Neumann, M., Srblijinovic, A., & Schatten, M. (2014). “Trust me, I know what I’m doing!” Competence Fields as a Means of Establishing Political Leadership. *European Quarterly of Political Attitudes and Mentalities*, 3(2), 18–33. Retrieved from <https://search.proquest.com/docview/1522269681?accountid=25704>
- Prianto, B. (2016). Partai Politik, Fenomena Dinasti Politik Dalam Pemilihan Kepala Daerah, Dan Desentralisasi. *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*. <https://doi.org/10.26905/pjiap.v1i2.436>
- Purwasito, A. (2003). *Komunikasi Multikultural*. Komunikasi Multikultural. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Rookes, P., & Willson, J. (2000). *Perception: Theory, Development and Organisation*. Optometry and Vision Science. London: Routledge. <https://doi.org/10.1097/00006324-200107000-00005>
- Sarwono, S. wirawan. (2010). *Psikologi Sosial: Individu dan Teori Psikologi Sosial*.
- Solomon, Robert, F. F. (2001). *Building Trust in Business, Politics, Relationships, and Life*. *Zhurnal Eksperimental’noi i Teoreticheskoi Fiziki*. New York: Oxford University Press.
- Suryono, J., Astuti, P. I., Rahayu, N. T., & Widayati, M. (2019a). (Caricature of Outdoor Media Political Advertising Dont Buy Cats in Sacks) kota Surakarta . *Iklan Politik Media Luar Ruang Honda Hendarto menarik untuk verbal peribahasa Jangan Membeli Kucing Politik Media Luar Ruang lainnya biasanya Politik Media Luar* , 12(1), 46–60.
- Suryono, J., Astuti, P. I., Rahayu, N. T., & Widayati, M. (2019b). Superlative Sign Typology of Curahan Hati – Harapan Warga Jakarta Political Advertising Video. In 2nd Workshop on Language, Literature and Society for Education; Solo. <https://doi.org/10.4108/eai.21-12-2018.2282712>
- Susanti, M. H. (2018). Dinasti Politik dalam Pilkada di Indonesia. *Journal of Government and Civil Society*, 1(2), 111. <https://doi.org/10.31000/jgcs.v1i2.440>
- Zuhro, S. (2013). Dicekalnya Ratu Atut oleh KPK, Bukti Penyimpangan Dari Politik Dinasti. Retrieved from <https://news.detik.com/berita/2385551/dicekalnya-ratu-atut-oleh-kpk-bukti-penyimpangan-dari-politik-dinasti>